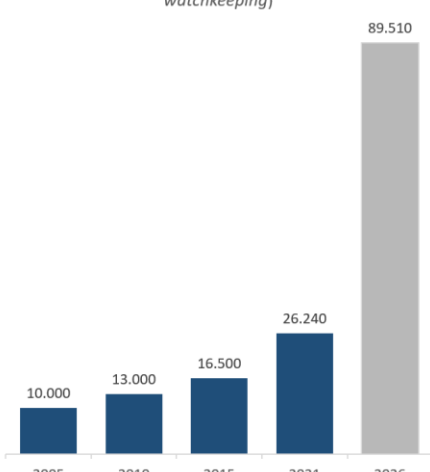
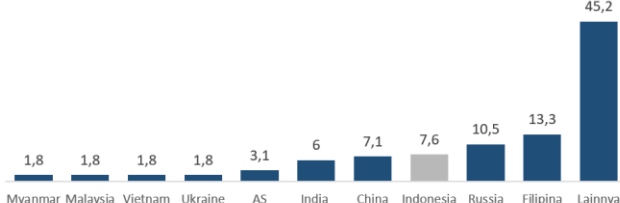


	DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI II / GEDUNG SIMULATOR TAHUN ANGGARAN 2025

BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN

1. NAMA SATKER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI a. Satuan Kerja : Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang b. KPA : KPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang c. PPK : PPK Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang																																																												
2. Nomor DIPA : SP DIPA- 032.12.2.403837/2025																																																												
3. ID SIRUP : 57261798																																																												
4. LATAR BELAKANG Indonesia berada pada posisi ke-3 berdasarkan jumlah pelaut keseluruhan, dibawah Filipina dan Rusia, namun menempati posisi ke-5 dalam jumlah pelaut yang memiliki jabatan perwira (Gambar 1). Ini mengindikasikan bahwa daya saing masyarakat maritim Indonesia, masih memerlukan penguatan khususnya kompetensi yang dimiliki, sesuai dengan STCW amandemen 2010 dan STCW-F 1995. Kekurangan Jumlah Pelaut Bersertifikat STCW (standards of training, certification, and watchkeeping)  <table border="1"> <caption>Kekurangan Jumlah Pelaut Bersertifikat STCW</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah Kekurangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>13.000</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>16.500</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>26.240</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>89.510</td> </tr> </tbody> </table> Pelaut Menurut Negara Asal (persen)  <table border="1"> <caption>Pelaut Menurut Negara Asal (persen)</caption> <thead> <tr> <th>Negara</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Myanmar</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Malaysia</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Vietnam</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Ukraine</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>AS</td> <td>3,1</td> </tr> <tr> <td>India</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>China</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>Indonesia</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td>Russia</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>Filipina</td> <td>13,3</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>45,2</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 45%;"> <thead> <tr> <th>Rank</th> <th>Pelaut Keseluruhan</th> <th>Officers</th> <th>Ratings*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Filipina</td> <td>Filipina</td> <td>Filipina</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rusia</td> <td>Rusia</td> <td>Rusia</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indonesia</td> <td>China</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>China</td> <td>India</td> <td>China</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>India</td> <td>Indonesia</td> <td>India</td> </tr> </tbody> </table> *skilled seafarers who carry out support work for officers Sumber: Bimco/ICS	Tahun	Jumlah Kekurangan	2005	10.000	2010	13.000	2015	16.500	2021	26.240	2026	89.510	Negara	Persentase (%)	Myanmar	1,8	Malaysia	1,8	Vietnam	1,8	Ukraine	1,8	AS	3,1	India	6	China	7,1	Indonesia	7,6	Russia	10,5	Filipina	13,3	Lainnya	45,2	Rank	Pelaut Keseluruhan	Officers	Ratings*	1	Filipina	Filipina	Filipina	2	Rusia	Rusia	Rusia	3	Indonesia	China	Indonesia	4	China	India	China	5	India	Indonesia	India
Tahun	Jumlah Kekurangan																																																											
2005	10.000																																																											
2010	13.000																																																											
2015	16.500																																																											
2021	26.240																																																											
2026	89.510																																																											
Negara	Persentase (%)																																																											
Myanmar	1,8																																																											
Malaysia	1,8																																																											
Vietnam	1,8																																																											
Ukraine	1,8																																																											
AS	3,1																																																											
India	6																																																											
China	7,1																																																											
Indonesia	7,6																																																											
Russia	10,5																																																											
Filipina	13,3																																																											
Lainnya	45,2																																																											
Rank	Pelaut Keseluruhan	Officers	Ratings*																																																									
1	Filipina	Filipina	Filipina																																																									
2	Rusia	Rusia	Rusia																																																									
3	Indonesia	China	Indonesia																																																									
4	China	India	China																																																									
5	India	Indonesia	India																																																									

Gambar 1. Kondisi Pelaut Dunia

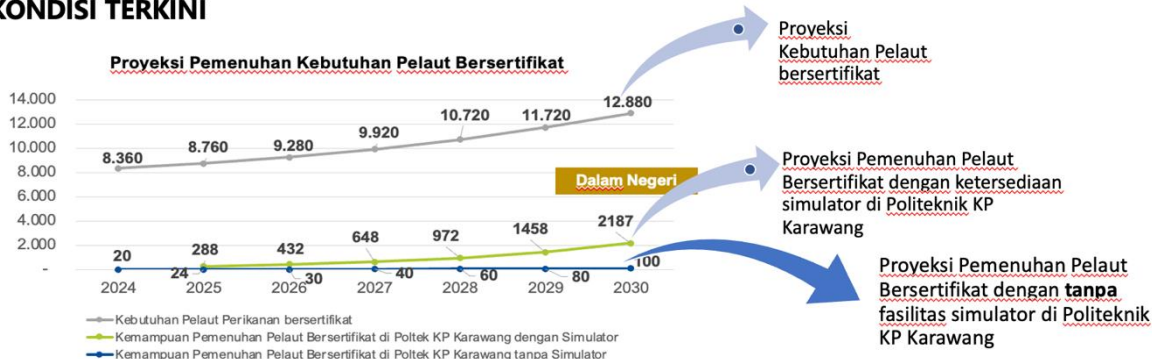
Kebutuhan akan pelaut perikanan yang kompeten dan profesional akan terus meningkat di masa depan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan para pelaut perikanan sendiri. Dengan mempersiapkan diri sejak dini, pelaut perikanan Indonesia dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi industri perikanan nasional (Gambar 2).

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

URGENSI KONDISI TERKINI



Gambar 2. Kebutuhan Pelaut Perikanan Nasional Bersertifikat

Dalam upaya merespon beberapa isu strategis dimaksud, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Satuan Pendidikan Tingginya berupaya mencetak SDM yang unggul, terampil, dan siap menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Untuk mewujudkan SDM unggul yang mampu berkompetisi pada ranah Internasional, maka Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Pengawakan Kapal Perikanan (Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 / STCW-F 1995) melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2019, yang kemudian mekanismenya diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, serta turunannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Implikasi diratifikasinya STCW-F 1995 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah harus memastikan penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang kepelautan perikanan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam STCW-F 1995, yangmana salah satunya terkait kelengkapan sarana dan prasarana. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Politeknik KP Karawang) sebagai salah satu Satuan Pendidikan Tinggi dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), saat ini belum dilengkapi dengan sarana Fishing and Navigation Simulator, yang merupakan prasarana dan sarana wajib yang harus dimiliki oleh Lembaga Diklat penyelenggara Sertifikasi Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat 1 (ANKAPIN-1) dengan standar spesifikasi mengacu pada STCW-F 1995 Chapter II / Appendix to Regulation 1. Untuk itu, perlu perhatian dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bidang kelautan dan perikanan khususnya pengawakan kapal perikanan, untuk mewujudkan masyarakat maritim Indonesia yang berdaya saing.

Komitmen ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi lulusan Satuan Pendidikan Tinggi KKP dengan penyertaan sertifikat pendamping ijazah, salah satunya Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat 1 (ANKAPIN-1) yang menunjukkan bahwa pemegang Sertifikat dimaksud dianggap memiliki kompetensi kenavigasian, komunikasi, dan pengelolaan operasi penangkapan ikan. Perkembangan teknologi kenavigasian, komunikasi, dan operasi



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

penangkapan ikan berimplikasi pada kewajiban Satuan Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara Sertifikasi ANKAPIN-1 untuk dilengkapi Fishing and Navigation Simulator yang sesuai dengan tingkat sertifikasi yang diterbitkan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai salah satu Satuan Pendidikan Tinggi dibawah KKP, yang telah menghasilkan lulusan sebanyak 6 angkatan dengan dilengkapi Sertifikasi ANKAPIN-1, belum memiliki Fishing and Navigation Simulator. Penyediaan Fishing and Navigation Simulator merupakan upaya penguatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi lulusan Satuan Pendidikan Tinggi KKP khususnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, yang merupakan bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mewujudkan tercapainya program Ekonomi Biru yang berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-2, serta penguatan pembangunan SDM bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-4.

Politeknik KP Karawang melalui dukungan dana melalui Program SBSN tahun 2025, telah mengajukan pengadaan fasilitas "Fishing and Navigation Simulator Tahap 1", yang meliputi pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung simulator dan beberapa perlengkapan pendukung.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini :

- a. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- e. PP Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- k. Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 tahun 2024 tentang standar harga satuan Tahun anggaran 2025.



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

5. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud pengadaan

Mengadakan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator yang dibangun di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sesuai Spesifikasi Teknis, Gambar dan Volume Teknis, serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

b. Tujuan pengadaan

Terbangunnya Gedung Administrasi II / Gedung Simulator untuk mendukung kompetensi SDM yang berkualitas di bidang kelautan dan perikanan

6. TARGET/SASARAN

Yang menjadi target / sasaran dalam pekerjaan ini adalah :

1. Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tepat waktu
2. Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan

Kegiatan ini bersumber dari dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dalam DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DIPA: DIPA-032.12.2.403837/2025

Kode mata anggaran : DL.2376.RBJ.725.301.GA.533111. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya

b. PAGU Anggaran Rp15.266.000.000,00

Terbilang : Lima belas miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah

c. Total perkiraan biaya yang diperlukan/HPS Rp15.265.995.000,00

Terbilang : Lima belas miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

8. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Jenis Kontrak : Harga Satuan
2. Cara Pembayaran : Termin

9. JAMINAN

a. Jaminan Uang Muka

Tidak ada

b. Jaminan Penawaran

Jaminan Penawaran sebesar 3% dari nilai total HPS ($3\% \times \text{Rp}15.265.995.000,00$) = Rp 457.979.850,00.

c. Jaminan Pelaksanaan

1. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

2. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

3. Jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah.

dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal kontrak sampai serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi.

d. Jaminan pemeliharaan

1. Nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, dengan masa berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi

2. Jaminan pemeliharaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah.

10. MASA BERLAKU PENAWARAN

60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal akhir pemasukan penawaran

11. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi berupa:

a) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 Kode KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran);

b) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau

c) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017)

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi / layanan jasa sub bidang berdasarkan SBU KBLI 2017: Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau berdasarkan SBU KBLI 2020 : Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002)

3. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
7. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan $3 \times \text{Npt}$ (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir), untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
8. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: $\text{SKP} = \text{KP} - \text{P}$, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

BAGIAN 2 – INFORMASI PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi
180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- b. Periode waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi
Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja
- c. Tanggal serah terima hasil pekerjaan konstruksi
180 hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja

2. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. Ruang lingkup pekerjaan
Secara deskriptif pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi :
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Struktur
 3. Pekerjaan Arsitektur
 4. Pekerjaan Elektrikal
 5. Pekerjaan Mekanikal
 6. Pekerjaan PlumbingKegiatan konstruksi fisik terdiri atas:
 - a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya
 - b) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - c) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

- d) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- e) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- f) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- g) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- h) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
- a) Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan

b. Lokasi pekerjaan

Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jalan Lingkar Tanjungpura KM. 3 Karangpawitan Karawang Jawa Barat

- c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK
DED, Gambar, dan Dokumen SMK

3. URAIAN PEKERJAAN, IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENETAPAN RISIKO

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan Struktur Beton	- Tertimpa material batu/bata - Kecelakaan alat - Terjatuh pada saat pengecoran - Iritasi pada kulit oleh semen - Tertusuk besi beton dan paku

4. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Gedung Administrasi II / Gedung Simulator yang dibangun di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi yang meliputi:

- a. gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawings*);
- b. kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan;
- c. laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir pengawasan teknis;
- d. berita acara pelaksanaan konstruksi, serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) dan serah terima akhir (*Final Hand Over*) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
- e. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (*commissioning test*);
- f. berita acara pelatihan bagi minimal 2 (dua) orang penerima bangunan terkait operasional bangunan dan terutama terkait dengan sistem mekanikal/elektrikal;



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

- g. foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pekerjaan (0%, 25%, 55%, 80% dan 100%) untuk masing-masing item pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik; dan
- h. dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) atau Standar Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

5. PERSONIL MANAJERIAL

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	4 tahun	SKK Ahli Madya Manajemen Proyek (602) atau Ahli Madya Manajemen Proyek Jenjang 8
2	Manajer Teknik	3 tahun	SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) atau Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8
3	Manajer Keuangan	3 tahun	-
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	0 tahun	SKK Ahli Madya K3 Konstruksi (603) atau Ahli Madya K3 Konstruksi Jenjang 8

6. PERALATAN UTAMA YANG DIBUTUHKAN

No	Jenis	Kapasitas (minimal)	Jumlah (minimal)
1.	Excavator	0,8 s.d 1.2 m ³ (Bucket)	1 Unit
2.	Bulldozer	16 s.d 20 Ton	1 Unit
3.	Dump Truck	8 s.d 12 Ton	1 Unit
4.	Mobile Crane	25 s.d 30 Meter	1 Unit
5.	Drop Hammer	1,5 s.d 2 Ton (Hammer)	1 Unit
6.	Truck Mixer	7 s.d 9 m ³	1 Unit

7. SPESIFIKASI TEKNIS

- a. Spesifikasi mutu/kualitas
Sesuai dengan spesifikasi teknis terlampir.
- b. Spesifikasi jumlah
Sesuai dengan BoQ dan spesifikasi teknis terlampir.
- c. Spesifikasi waktu
Sesuai dengan kurva S kemajuan pelaksanaan pekerjaan.



DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DENGAN METODE TENDER

- d. Spesifikasi pelayanan
Jaminan Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pertama (PHO).
- e. Spesifikasi teknis lainnya
Sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

8. KRITERIA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Kondisi konstruksi pada saat serah terima sebagai standar penandatanganan serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi :

- a. Gedung administrasi II / gedung simulator yang dibangun dalam kondisi terbangun sesuai dengan dokumen teknis;
- b. Pelaporan harian, mingguan, bulanan dan pada setiap tahapan pekerjaan yang dilengkapi dengan dokumentasi setiap harinya;
- c. Dokumen *Commissioning Test*;
- d. Menyerahkan *As Built Drawing* kepada PPK baik dalam bentuk dokumen cetak sebanyak 3 rangkap maupun dalam bentuk *soft file*;
- e. Dokumen garansi mesin; dan
- f. Dokumen lain-lain yang terkait.

9. HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN

Apabila terdapat kendala dalam permasalahan anggaran hingga batas akhir ditandatanganinya kontrak, maka calon penyedia tidak berhak menuntut ganti rugi atau melakukan gugatan ataupun tuntutan hukum kepada PPK.

Karawang, Februari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

TTD

Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi
NIP. 19871109 201012 1 003